

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Secara terminologi menurut menurut Jeremy Betham hubungan internasional merupakan hal yang diminati seseorang terhadap hubungan antar negara (Andrias Darmayadi, 2015, p. 22).

Dalam buku *Methodology in Study of International Relations* Trygev Mathiensen mengatakan bahwa hubungan internasional memiliki berbagai macam arti:

1. Hubungan internasional memiliki berbagai macam aspek yang berfokus pada aspek-aspek internasional dari cabang ilmu pengetahuan.
2. Merupakan reformasi dari politik internasional
3. Seluruh aspek internasional dari lingkungan sosial manusia, dalam arti : suatu negara memiliki tingkah laku manusia nya sendiri dan hal tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku negara lain.
4. Merupakan cabang ilmu pengetahuan yang independen.

Di era kontemporer hubungan internasional merupakan suatu studi dalam masa peralihan atau masa transisi pada masyarakat dunia. Menurut Norman D. Palmer Howard, C. Perkins dalam buku *Internasional Relations* menyatakan

bahwa asas – asas atau prinsip – prinsip dan faktor – faktor dalam hubungan Internasional tidak mengalami perubahan, suasana lingkungan internasional sudah berubah dan masih terus berubah.

Perubahan yang terjadi disebabkan oleh perubahan dalam sistem kenegaraan, perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga peranan elemen–elemen lama dan baru harus di padukan. (Norman, Howard. 1947:168).

Menurut Hans Morgenthau, seorang ilmuwan politik terkenal, memandang hubungan internasional sebagai arena perjuangan antara negara-negara yang berlomba-lomba memperoleh kekuasaan dan menjaga kepentingannya masing-masing.

Konsep utama yang diuraikan oleh Morgenthau dalam bukunya:

1. Kekuasaan adalah faktor utama dalam hubungan internasional: Morgenthau berpendapat bahwa negara-negara bersaing untuk memperoleh kekuasaan dan kepentingan nasional mereka. Kekuasaan, menurut Morgenthau, dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi keadaan dunia sesuai dengan kepentingan negara.
2. Kebijakan luar negeri yang efektif didasarkan pada penilaian yang realistis tentang kekuatan: Morgenthau menekankan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif harus didasarkan pada analisis yang realistis tentang kekuatan dan kepentingan nasional. Negara harus mengevaluasi kekuatan mereka sendiri serta kekuatan negara-negara lain, sehingga mereka dapat merancang strategi yang sesuai untuk memperoleh kepentingan nasional mereka.

3. Anarki internasional sebagai ciri khas sistem internasional: Menurut Morgenthau, sistem internasional tidak memiliki pemerintahan sentral yang dapat mengatur negara-negara. Oleh karena itu, negara-negara harus mengandalkan diri sendiri untuk menjaga keamanan nasional mereka, dan bersaing untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan di arena global.
4. Diplomasi sebagai sarana untuk menjaga stabilitas: Morgenthau berpendapat bahwa diplomasi adalah cara untuk menghindari perang dan mempertahankan stabilitas dalam sistem internasional yang tidak stabil. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan konflik tanpa mengorbankan kepentingan nasional mereka.

Dalam buku "Introduction to International Relations" yang ditulis oleh Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani mengulas mengulas Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara negara-negara dan aktor-aktor internasional dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Tujuan utama dari studi Hubungan Internasional adalah untuk memahami dinamika hubungan internasional dan mencari cara untuk menjaga stabilitas dan keamanan di dunia.

Tujuan dari studi hubungan internasional adalah untuk memahami bagaimana negara-negara dan aktor internasional saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai bidang. Studi ini melibatkan analisis terhadap kebijakan luar negeri, diplomasi, perjanjian internasional, organisasi internasional, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi hubungan antarnegara.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep penting dalam hubungan internasional, mengacu pada segala sesuatu yang dianggap penting bagi suatu negara untuk mencapai tujuan dan keamanannya. kepentingan nasional adalah "sebuah konsep abstrak yang berarti segala sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk keamanan nasional, integritas wilayah, stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan rakyatnya". (Lerche, 2002)

Kepentingan nasional dapat berbeda tergantung pada kondisi dan karakteristik negara serta tujuan dan strategi politik luar negeri pemerintah. Dalam konteks politik luar negeri, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai upaya negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri serta memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik di tingkat internasional. (Nye, 2008)

Beberapa contoh kepentingan nasional yang sering dianggap penting oleh banyak negara di dunia adalah:

1. Keamanan nasional: melindungi negara dari ancaman militer dan terorisme serta menjaga stabilitas politik dalam negeri.
2. kekayaan nasional: Memperjuangkan kepentingan ekonomi, termasuk sumber daya alam dan perdagangan internasional.
3. Hubungan Internasional: Membangun dan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain dan memperjuangkan status dan pengaruh dalam skala global.

Kepentingan nasional merupakan segala sesuatu yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup suatu negara, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kepentingan nasional meliputi kepentingan politik, keamanan, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Keamanan dan kedaulatan negara adalah inti dari kepentingan nasional, karena tanpa keduanya, negara tidak dapat berfungsi sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat.

Dalam pandangan Perwita dan Yani, kepentingan nasional tidak bersifat statis, tetapi selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di dalam maupun di luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan luar negeri negara lain, dinamika hubungan internasional, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial-budaya di dalam negeri. Perwita dan Yani menegaskan juga bahwa kepentingan nasional harus menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri, negara harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepentingan nasional, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, Perwita dan Yani menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional sebagai inti dari kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia juga harus mampu memperkuat ekonomi nasional, melindungi hak dan kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri, serta memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di forum internasional. (perwita & Yani, 2005)

Menurut Djoko Suyanto kepentingan nasional Indonesia mencakup lima aspek utama, yaitu:

1. Keamanan nasional: Keamanan nasional Indonesia diartikan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan keamanan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Politik: Aspek politik kepentingan nasional Indonesia mencakup upaya memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas politik, memajukan hak asasi manusia, serta menempatkan Indonesia sebagai pemimpin regional maupun global.
3. Ekonomi: Aspek ekonomi kepentingan nasional Indonesia terkait dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, mengembangkan sektor industri dan pertanian, serta memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara lain.
4. Sosial-budaya: Aspek sosial-budaya kepentingan nasional Indonesia terkait dengan upaya memperkuat identitas nasional dan budaya Indonesia, menjaga harmoni antarsuku, serta memperkuat keterpaduan sosial.
5. Lingkungan hidup: Aspek lingkungan hidup kepentingan nasional Indonesia terkait dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global terkait lingkungan dan perubahan iklim. (Suyanto, 2011)

Jika disimpulkan Kepentingan nasional Indonesia meliputi berbagai aspek yang penting bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara Indonesia

sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan berdaulat. Beberapa hal yang dianggap sebagai kepentingan nasional Indonesia antara lain:

1. Kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional Kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional merupakan inti dari kepentingan nasional Indonesia. Kedaulatan meliputi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, menentukan kebijakan politik, dan menjaga integritas wilayah Indonesia. Keutuhan wilayah mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan Indonesia. Keamanan nasional mencakup perlindungan terhadap ancaman dari dalam dan luar negeri.
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kepentingan nasional Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat internasional. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, memperkuat sektor ekonomi yang produktif, dan memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat internasional.
3. Perlindungan dan pengembangan sumber daya alam Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan menjadi salah satu kepentingan nasional yang penting untuk dilindungi dan dikembangkan. Hal ini mencakup sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan laut.
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia menjadi kepentingan nasional

Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa dan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

5. Kepentingan internasional Sebagai negara yang berdaulat dan memiliki peran di tingkat internasional, Indonesia juga memiliki kepentingan internasional. Hal ini mencakup menjaga hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di forum internasional, dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah strategi suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di tingkat internasional dan membangun hubungan dengan negara lain. Kebijakan luar negeri adalah “upaya pemerintah suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di tingkat internasional, termasuk di bidang keamanan, ekonomi, politik, dan budaya”. Kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut, maupun faktor eksternal, seperti hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain. Kebijakan luar negeri juga dapat dilakukan untuk memperkuat posisi dan pengaruh negara di tingkat internasional serta untuk mempromosikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh negara. (Morgenthau, 1978)

Beberapa aspek penting politik luar negeri yang sering dibahas dalam hubungan internasional antara lain:

1. Tujuan dan strategi kebijakan luar negeri: meliputi, antara lain, melindungi keamanan nasional, mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik, serta mempromosikan nilai dan kepentingan nasional di tingkat internasional.
2. Hubungan bilateral dan multilateral: Membangun hubungan dengan negara lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan memperjuangkan status dan pengaruh di tingkat internasional.
3. Peran aktor kebijakan luar negeri: Ini mencakup peran pemerintah, diplomat dan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Lasswell mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai serangkaian keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan nasional di bidang hubungan internasional. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh tujuan nasional dan kepentingan yang ingin dicapai di tingkat internasional. (Lasswell, 1948)

Menurut Holsti kebijakan luar negeri merupakan ide dan gagasan dalam membentuk rumusan dengan tujuan untuk memberikan suatu solusi pada suatu permasalahan ataupun memberikan perubahan-perubahan dalam suatu wilayah. Pada dasarnya terdapat perbedaan dalam kebijakan suatu negara, tetapi dengan adanya kebijakan luar negeri maka akan ada kesepahaman dalam melakukan kerjasama, hal ini dikarenakan terdapat kepentingan atau kebutuhan pribadi ataupun kepentingan kolektif. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri terdapat

alat dalam menentukan kebijakan luar negeri. Terdapat lima kategori : diplomasi, ekonomi, intervensi, disinformasi, operasi militer rahasia dan persenjataan, pengaruh politik dan perang (Holsti, Kalevi. 2016).

Politik luar negeri menurut Rosenau dalam buku Perwita dan Yani dikonseptualisasikan menjadi tiga gagasan yang berhubungan antara satu dengan yang lain, sebagai berikut :

1. Kebijakan luar negeri sebagai perspektif, hal ini mencangkup nilai-nilai yang diperlukan untuk kebijakan luar negeri suatu negara dan berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan tersebut. Perspektif ini dihasilkan dari pengetahuan akan sejarah dan perspektif individu dalam memandang sesuatu yang strategis dalam urusan internasional.
2. Kebijakan luar negeri sebagai taktik, strategi atau rencana dalam bertindak. Dalam kebijakan luar negeri strategi atau taktik dipandang mampu untuk menganalisis kesulitan yang akan terjadi oleh pihak internasional. Pemikiran elit terhadap kebijakan luar negeri suatu negara dalam menghadapi kondisi tertentu dengan perbedaan dari aktor lainnya memerlukan rencana yang matang sebagai dasar dari strategi negara tersebut.
3. Tipe perilaku (*as a form of behavior*) dalam kebijakan luar negeri. Gagasan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pembuat keputusan dalam menanggapi suatu fenomena diluar, sehingga dapat menerjemahkan arah tujuan mereka dan mengartikulasikan aspirasi atau suatu komitmen tertentu. Dikenal sebagai perilaku kebijakan luar negeri.

Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri akan mempengaruhi tindakan yang akan diikuti dengan kebijakan luar negeri. Proses pengambilan keputusan tentu akan dipengaruhi oleh variabel internal dan variabel eksternal di suatu negara. Variabel internal adalah variabel yang mempengaruhi suatu negara di tingkat dalam negeri, seperti ekonomi, militer dan struktur politik. Variabel eksternal merupakan variabel yang berasal dari luar negeri suatu negara, seperti geopolitik, sifat suatu negara, dan lain-lain.

Dalam kebijakan luar negeri terdapat rumusan yang menjadi tujuan suatu negara dalam melakukan kebijakan luar negeri, sebagai berikut :

1. Nilai, pada tujuan pokok suatu negara merupakan faktor penting dari merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan atas dasar tujuan suatu negara tersebut.
2. Waktu, dalam perumusan kebijakan luar negeri diperlukannya unsur waktu yang target nya harus dipenuhi dalam melaksanakan pencapaian tujuan.
3. Tuntutan tujuan, yang harus dijalankan oleh suatu negara (anggota) dalam waktu tertentu diwajibkan sesuai komitmen atau kesepakatan yang telah dibuat (K.J Holsti 1983)
4. Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri perlu adanya kapabilitas. Negara memiliki Dalam kapabilitasnya merancang maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri demi keamanan nasional.

Dalam kebijakan luar negeri suatu negara perlu mempunyai pandangan, keputusan dan tindakan yang disesuaikan negara lain dan hal tersebut lah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan yang sesuai.(K.J Holsti 1983)

2.1.4 Idiosinkratik

"Ideosinkratik" adalah istilah yang terbentuk dari gabungan kata "ideologi" dan "sinkratik" atau "sinkratis". Ideologi, menurut Antonio Gramsci, adalah kerangka analisis untuk memahami masalah-masalah tertentu. Sinkratik mengacu pada penggabungan yang harmonis dari berbagai aspek yang positif. Dalam analisis politik luar negeri, istilah idiosinkratik digunakan ketika pengaruh individu dalam pembuatan kebijakan memiliki dampak keseluruhan.

Secara umum, idiosinkratik mencakup segala aspek yang dimiliki oleh pengambil keputusan, seperti nilai-nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang membentuk proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Lebih singkatnya, Coulombis dan Wolfe mendefinisikan faktor idiosinkratik sebagai variabel yang berhubungan dengan persepsi, citra, dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan.

Menurut H.C. Warren, idiosinkratik mencakup pengaturan mental seseorang pada berbagai tahap perkembangan mereka. Ini termasuk karakteristik pribadi, inteletualitas, temperamen, keahlian moral, dan sikap yang terbentuk dari pengalaman hidup dan perkembangan yang telah mereka alami.

Kekuatan pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan dapat menghasilkan variasi unik dalam politik luar negeri, yang dikenal sebagai "*idiosyncratic*" dalam konteks politik luar negeri. Istilah ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam pembuatan kebijakan yang pada akhirnya memengaruhi hubungan luar negeri. Keberadaan politik luar negeri dapat sangat dipengaruhi oleh faktor *idiosyncratic*, sebagaimana dijelaskan oleh Rosenau (2006:15) dan Perwita & Yani (2005:32) .

Idiosinkratik adalah konsep yang mengacu pada kualitas atau karakteristik unik dari individu atau negara yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan internasional. Dalam konteks hubungan internasional, idiosinkratik seringkali menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan luar negeri, aktivitas diplomasi, dan perilaku negara dalam sistem internasional. Idiosinkratik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sejarah, budaya, ideologi politik, kepribadian seorang pemimpin, dan faktor lain yang mempengaruhi pendapat dan perilaku suatu negara dalam hubungan internasional. Misalnya, perbedaan karena faktor budaya suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan perilaku diplomasi negara tersebut di tingkat internasional. (Akbarzadeh & Connor, 2017)

Contoh faktor khusus dalam hubungan internasional adalah:

1. Budaya: Budaya suatu negara dapat mempengaruhi bagaimana negara tersebut berperilaku secara internasional, misalnya dalam diplomasi dan kerjasama internasional.

2. Ideologi: Ideologi politik suatu negara dapat mempengaruhi pendapat dan sikap negara tersebut dalam hubungan internasional, misalnya dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri dan intervensi internasional.
3. Kepribadian Manajer: Karakteristik pribadi seorang kepala negara seperti kepribadian, pengalaman hidup dan pendapat politik pribadi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Faktor politik-ideologi juga dapat mempengaruhi pendapat dan sikap negara-negara dalam hubungan internasional. Ideologi politik suatu negara dapat mempengaruhi pandangan negara tersebut terhadap isu-isu global dan membentuk kebijakan luar negeri negara tersebut serta intervensi internasional. Kepribadian pemimpin juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara. Karakteristik pribadi seorang kepala negara seperti kepribadian, pengalaman hidup dan pendapat politik pribadi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Kekhususan hubungan internasional telah dipelajari oleh beberapa peneliti dan akademi. Menunjukkan bahwa kesunyian dapat menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara dan mempengaruhi tindakan diplomasi. juga menekankan bahwa karakteristik pemimpin negara dapat mempengaruhi perilaku negara dalam sistem internasional. Menjelaskan bahwa idiosinkratik merupakan faktor penting dalam membentuk sistem internasional, dimana setiap negara memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi kebijakan dan tindakannya. (Hudson, 2007)

Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan ketika mempelajari orisinalitas, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif

sering menggunakan analisis studi kasus untuk membahas karakteristik individu atau negara tertentu dan bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi perilaku mereka di tingkat internasional. Sedangkan dalam pendekatan kuantitatif, analisis statistik digunakan untuk menilai hubungan antara karakteristik individu atau negara dan tindakan atau strategi mereka dalam sistem internasional. (Goldstein, 2017)

Mempengaruhi faktor idiosinkratik, dalam buku "*Understanding Foreign Policy Decision Making*" karya Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. tahun 2010, Alex Mintz membahas tentang tiga indikator penting yang ia masukkan ke dalam model analisis idiosinkratik untuk memahami pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Motivasi individu: Indikator ini mengacu pada faktor-faktor psikologis dan emosional yang memotivasi individu untuk mengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri. Beberapa contoh motivasi individu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan adalah ambisi, keinginan untuk mempertahankan citra diri, kepercayaan diri, dan keinginan untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi.
2. Persepsi individu: Indikator ini mengacu pada cara individu mempersepsikan situasi dan informasi dalam kebijakan luar negeri. Cara individu mempersepsikan situasi dan informasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman masa lalu, kepercayaan politik, dan pandangan ideologis.

3. Gaya kepemimpinan individu: Indikator ini mengacu pada gaya kepemimpinan individu dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Beberapa contoh gaya kepemimpinan individu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan adalah kepemimpinan otoriter, partisipatif, transaksional, dan transformasional.

Dengan mempertimbangkan tiga indikator penting ini, model analisis idiosinkratik dapat membantu untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri dibuat dan diimplementasikan oleh individu yang berbeda. (Alex & Karl, 2010)

2.1.4.1 Karakteristik Kepribadian Politik Luar Negeri

Dalam melihat hubungan antara karakteristik pribadi pemimpin politik dan perilaku kebijakan luar negeri suatu negara, dalam bukunya hermann berfokus pada empat dimensi kepribadian pemimpin politik, yaitu kepercayaan diri, otonomi, kebutuhan untuk mencapai tujuan, dan orientasi terhadap risiko (Margaret, 1980). Ideologi suatu negara dan tujuannya sangat dipengaruhi oleh pemimpin negara itu sendiri. Dalam memahami ciri-ciri seorang pemimpin menganalisis skema ide sangat penting, termasuk keyakinan, motivasi, gaya pengambilan keputusan, dan gaya interpersonal.

Untuk memahami idiosinkratik, perlu merunut kepribadian individu tersebut. Kepribadian seseorang sering dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pribadi yang tertutup dan yang terbuka. Di sisi lain, terdapat juga pengelompokan berdasarkan tingkat dominasi karakter seseorang. Etheredge menghubungkan

kedua klasifikasi ini untuk menemukan ciri-ciri kepribadian yang dapat memengaruhi politik luar negeri, sebagai berikut:

a. Pemimpin Blok:

Ini menggabungkan kepribadian tertutup dan sangat dominan. Individu ini memiliki keteguhan dan dominasi yang kuat terhadap tujuan tertentu.

b. Pemimpin Dunia:

Ini menggabungkan kepribadian terbuka dan dominan. Pemimpin ini cenderung menggunakan kekuatan militer, fleksibel, dan pragmatis dalam pendekatan politiknya.

c. Pemelihara:

Ini menggabungkan kepribadian tertutup dan kurang dominan. Cenderung mempertahankan status quo dalam kebijakan politik.

d. Konsiliator:

Ini menggabungkan kepribadian terbuka dan kurang dominan. Ciri-cirinya adalah membantu dan kurang konsisten (Amstutz, 2013)

Lebih lanjut, Margaret G. Hermann memberikan gambaran karakter kepribadian yang ada pada pemimpin negara di seluruh dunia:

a. Pelatihan dalam Urusan Luar Negeri:

Mengacu pada individu yang telah menduduki posisi penting dalam politik atau pemerintahan, memberikan pemahaman tentang urusan luar negeri dan proses pengambilan keputusan.

b. Nasionalisme:

Sejauh mana emosi dan rasa cinta tanah air mempengaruhi individu, serta penekanan pada kehormatan dan kedaulatan negaranya.

c. Keyakinan pada Kemampuan Sendiri untuk Mengendalikan Peristiwa:

Tingkat kepercayaan individu terhadap kemampuannya dalam mengatasi masalah dan mengendalikan situasi.

d. Kebutuhan akan Kekuatan:

Fokus individu pada pembentukan, pemeliharaan, atau pemulihan kekuatan negaranya.

e. Kebutuhan akan Persatuan:

Perhatian terhadap hubungan kekerabatan dan perdamaian sebagai kebutuhan dasar.

f. Kompleksitas Konseptual:

Tingkat perbedaan dalam menganalisis lingkungan, di mana individu memiliki pandangan berbeda dalam mengamati suatu kejadian.

g. Ketidakpercayaan pada Orang Lain:

Sikap penuh ketidakpercayaan atau curiga terhadap orang lain, yang disertai dengan keragu-raguan, kesulitan memberi kepercayaan, dan ketakutan terhadap orang lain (Rudy, 2002: 97)

Hermann memberikan karakteristik pribadi yang menggambarkan kepribadian politik, antara lain:

1. Ekspansionis

Individu ini tidak ingin kehilangan kendali. Mereka memiliki keinginan untuk memegang kendali yang besar (kebutuhan tinggi untuk kekuasaan),

memiliki keterbatasan dalam menyadari adanya berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan (kompleksitas konseptual rendah), dan memiliki ketidakpercayaan pada orang lain (kecurigaan tinggi terhadap orang lain). Namun, individu dengan karakter nasionalis memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan integrasi negara (nasionalisme tinggi). Individu ini tidak terlalu memperhatikan pentingnya hubungan persahabatan (kebutuhan rendah untuk afiliasi) dan memiliki tingkat inisiatif yang tinggi (percaya diri dalam mengendalikan kejadian). Tipe ekspansionis ini menggunakan agresivitas dalam mencapai tujuannya.

2. Independen Aktif

Individu semacam ini mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa membahayakan hubungan yang sudah terjalin dengan negara-negara lain. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan kebebasan dalam menjalin hubungan sebanyak mungkin. Ciri-ciri dari individu yang termasuk dalam kategori ini adalah nasionalisme tinggi, kompleksitas konseptual tinggi, kecurigaan rendah terhadap orang lain, percaya diri dalam mengendalikan diri sendiri, kebutuhan tinggi untuk afiliasi, dan kebutuhan rendah untuk kekuasaan.

3. *Influent*

Individu ini berusaha untuk menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitarnya, memiliki keinginan dan hasrat untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Pemimpin dengan karakter seperti ini akan menempatkan tujuannya sebagai yang paling penting dibandingkan dengan

yang lain. Pemimpin negara akan bersikap protektif terhadap negara yang menentangnya. Ciri-cirinya adalah *low nasionalism, low conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power.*

4. Mediator

Karakter individu ini sering mempertemukan perbedaan di antara negara dan berperan sebagai "perantara". Pemimpin ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dan selalu berusaha menyelesaikan masalah global. Ciri-cirinya termasuk "*low nasionalism*", "*high conceptual complexity*", "*low distrust of others*", "*high believe in own control*", "*high need for affiliation*", dan "*high need for power*". Umumnya, pemimpin seperti ini lebih suka berada di belakang layar dan menghindari intervensi meskipun memberikan implikasi pada negara lain.

5. Oportunis

Seseorang yang berusaha untuk tampil bijaksana dan mengambil keuntungan dari situasi yang dihadapi. Pemimpin seperti ini biasanya mengeluarkan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan sedikit mengesampingkan komitmen ideologi. Ciri-cirinya termasuk "*low nasionalism*", "*high conceptual complexity*", "*low distrust of others*", "*low believe in own control*", "*low need for affiliation*", dan "*low need for power*".

6. Partisipatif

Mempunyai hasrat untuk memfasilitasi keterlibatan negara dalam arena internasional. Individu seperti ini tertarik untuk mencari nilai tambah bagi

negara dan mencari alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi negara atau negara lain. Ciri-cirinya termasuk *"low nasionalism"*, *"high conceptual complexity"*, *"low distrust of others"*, *"low believe in own control"*, *"high need for affiliation"*, dan *"low need for power"*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan paparan beberapa teori di atas yang mendukung untuk penelitian ini, penulis mempunyai kerangka pemikiran dengan mengaplikasikan beberapa teori untuk memudahkan penelitian. Penulis akan menjelaskan bagaimana pemenuhan tujuan kepentingan nasional Indonesia yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasasila Bandung memberikan pengaruh terhadap idiosinkratik Menteri Luar Negeri Indonesia, peneliti menggambarkan karakteristik kepribadian politik sebagai penunjang idiosinkratik Retno Marsudi yaitu idependen aktif yang dilihat dari latar belakang dan tinjauan pustaka bahwa saat kepemimpinan Retno Marsudi memiliki hubungan yang cukup erat dengan negara -negara lain, lalu dalam faktor mediator Retno Marsudi memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik – konflik dikancah internasional sebagai aktor penengah.

Dalam hal ini kepentingan nasional berpengaruh terhadap idiosinkratik Retno Marsudi, lalu idiosinkratik Retno Marsudi mempengaruhi bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia untuk maju sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, selanjutnya upaya indonesia maju sebagai anggota tidak tetap dewan

keamanan PBB dipengaruhi oleh kepentingan nasional indonesia sehingga dalam alur kerangka pemikiran ketiga variable saling berkaitan satu sama lain.



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pemikiran